



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, AKUNTABILITAS, DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**



ELMA NURKHANIFAH

NIM 40322094

2026



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, AKUNTABILITAS, DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**



ELMA NURKHANIFAH

NIM 40322094

2026

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

ELMA NURKHANIFAH

NIM 40322094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

ELMA NURKHANIFAH

NIM 40322094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Nurkhanifah
NIM : 40322106
Judul Skripsi : **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Elma Nurkhanifah
Elma Nurkhanifah

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Elma Nurkhanifah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

DI PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan

naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Elma Nurkhanifah**
NIM : **40322106**
Judul : **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang**
Skripsi

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakn sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,



Farida Rohmah, M.Sc.

NIP. 198801062019082000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Elma Nurkhanifah**
NIM : **40322094**
Judul Skripsi : **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas,
dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang**
Dosen Pembimbing : **Farida Rohmah, M.Sc.**

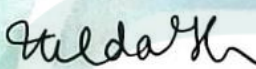
Telah diujikan pada hari Jumat, 10 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I


H. Gunawan Aji, M.Si
NIP 196902272007121001

Penguji II


Wilda Yulia Rusyida, M.Sc
NIP 199110262019032014

Pekalongan, 13 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. A.M. Muhiy Shafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP 197806162003121003

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Berusahalah semaksimal mungkin apa yang bisa kamu kendalikan, diluar itu jangan terlalu dipikirkan, *just do your best*”

“Ketika ada kesulitan yang datang, dari pada menyalahkan keadaan, syukuri saja apa yang sudah kamu punya sekarang, *what do I have*”

“Tidak ada yang gampang ketika memulai, kalau gampang semua orang sudah punya”

(Eva Alicia)

-2026-



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari atas segala keterbatasan dalam skripsi ini, namun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis menerima berbagai dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Berikut penulis menyampaikan persembahan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada Allah SWT, Segala Puji Bagi-Mu, terima kasih karena berkat Rahmat dan Karunia-Mu skripsi ini terselesaikan dengan baik. Engkau bukakan jalan yang terbaik, memberikan kekuatan dan kesabaran disetiap proses yang penulis lalui.
2. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Muslim dan Ibu Siti Patonah. Terima kasih karena selalu menjadi penguat dan mendukung dari semua segi, baik finansial maupun mental. Terima kasih selalu mendoakan, menyayangi sepenuh hati, dan berkorban banyak untuk bisa memberikan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Setiap pengorbanan, ketulusan, dan kerja keras yang telah bapak dan ibu berikan akan selalu menjadi motivasi serta sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Kepada Saudari Minati Sari selaku kakak penulis, serta semua keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa menghadirkan dukungan, doa-doa tulus dan perhatian dalam berbagai bentuk, baik moril maupun materil.
4. Almamater tercinta, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Farida Rohmah, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ustadz Abdul Qohar dan Ustadzah Lulu selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon.
7. Teman pondok Karina Atha Nabila, Shafiyya Zahra, Tyas Ayu Farahdina, dan adik tersayang Nihayatul Amanah, yang selalu menghadirkan kekuatan pada penulis di saat senang, sedih, kecewa, dan selalu mendukung, serta memberikan tawa bahagia. Terima kasih telah kebersamaan sehingga suasana terasa lebih hangat dan penuh makna.
8. Sahabat-sahabat tercinta, Agil Kiki Anggreani, Risalatul Khasanah, Filma Azhari, Ayu Ning Tyas Sulistiyowati, Iza Mutia. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar yang baik, serta selalu mendukung dan menghibur saat penulis sedang merasakan putus asa.
9. Terakhir, untuk diri penulis yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah kuat dan berani meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Proses yang mengantarkan penulis pada perjalanan ini semoga menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik lagi.

ABSTRAK

ELMA NURKHANIFAH. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siawang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pematang Siawang. Fenomena inkonsistensi opini audit BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang masih menyisakan catatan kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan menjadi latar belakang utama penelitian ini. Berlandaskan pada Teori Agensi, penelitian ini memosisikan pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat serta pemerintah pusat sebagai prinsipal untuk meminimalkan asimetri informasi melalui pelaporan keuangan yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di Inspektorat Kabupaten Pematang Siawang. Sampel penelitian ini berjumlah 31 responden yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 66,9%. Secara parsial, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, Akuntabilitas ditemukan berpengaruh signifikan namun memiliki arah negatif dalam model penelitian ini. Sementara itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

ELMA NURKHANIFAH. The Impact of Internal Control Systems, Human Resource Competence, Accountability, and Transparency on the Quality of Financial Reports of the Pemalang Regency Local Government.

This study aims to examine and analyze the effect of the Internal Control System, Human Resource Competence, Accountability, and Transparency on the Quality of Local Government Financial Statements (LKPD) in Pemalang Regency. The phenomenon of inconsistency in BPK's audit opinions from Qualified Opinion (WDP) to Unqualified Opinion (WTP), which still leaves notes on control weaknesses and non-compliance, forms the main background of this research. Based on Agency Theory, this study positions the local government as an agent and the community as well as the central government as principals to minimize information asymmetry through quality financial reporting.

The research method used is a quantitative approach with primary data sources obtained through the distribution of structured questionnaires to Government Internal Supervisory Apparatuses (APIP) and Regional Government Affairs Supervisory Officials (PPUPD) at the Pemalang Regency Inspectorate. The research sample consisted of 31 respondents determined through a total sampling technique. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS 27 statistical software.

The results show that simultaneously, the four independent variables significantly affect the quality of financial statements with an Adjusted R Square value of 66.9%. Partially, the Internal Control System and Transparency have a positive and significant effect on the quality of financial statements. Conversely, Accountability was found to have a significant effect but with a negative direction in this research model. Meanwhile, Human Resource Competence did not show a significant effect on the quality of local government financial statements.

Keywords: Internal Control System, HR Competence, Accountability, Transparency, Quality of Local Government Financial Statements.

KATA PENGANTAR

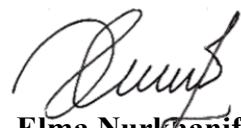
Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Dr. A. M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
4. Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak Ade Gunawan, M.M., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA),
6. Bapak dan Ibu selaku dosen penguji skripsi,
7. Pihak Inspektorat Kabupaten Pemalang yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
8. Orang tua dan keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan moral dan material untuk menyelesaikan skripsi ini,
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis



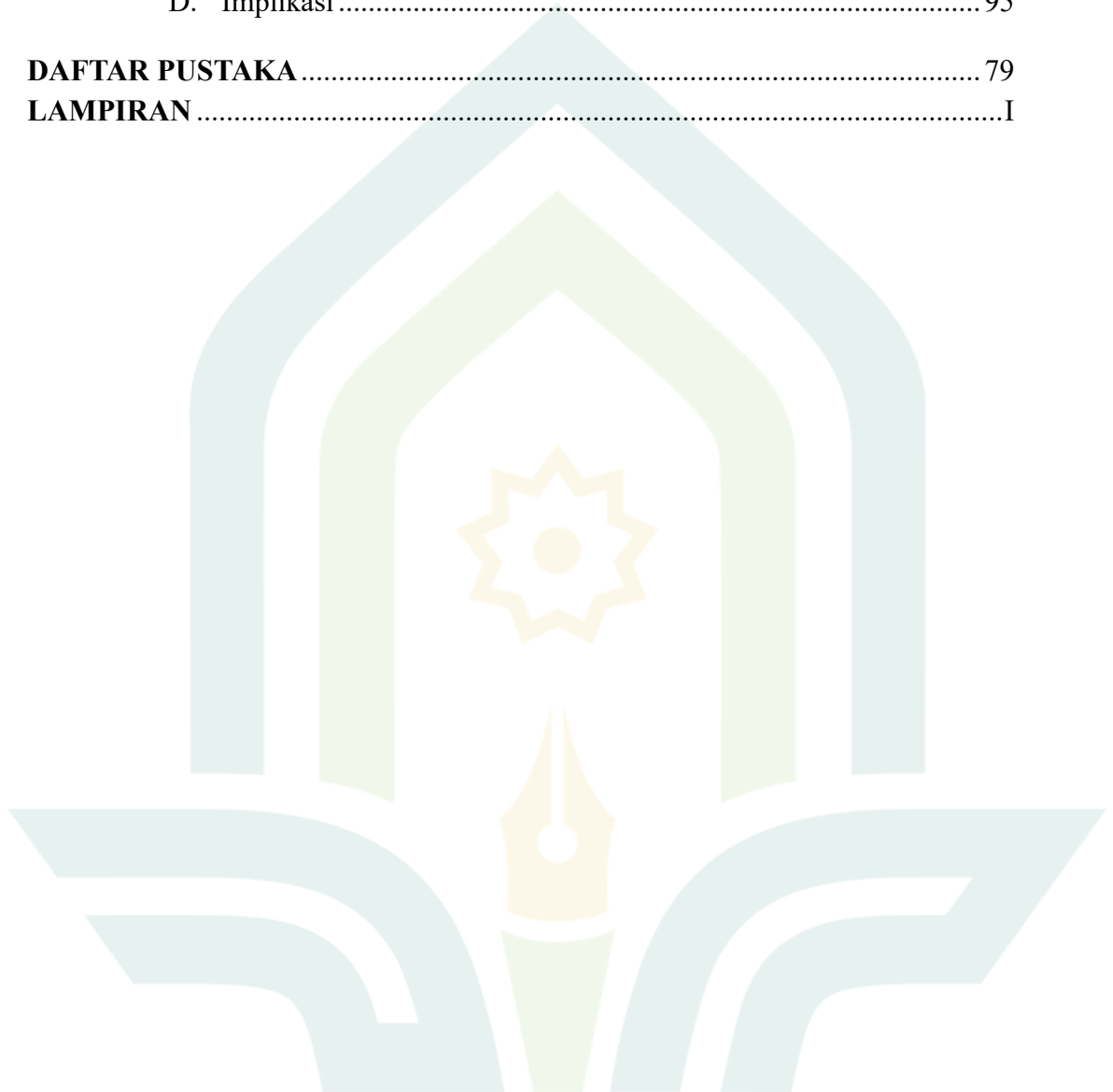
Elma Nurkhanifah

NIM. 40322094

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
B. Telaah Pustaka	27
C. Kerangka Berpikir	33
D. Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Setting Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	38
E. Variabel Penelitian	39
F. Sumber Data	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Metode Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum	49

B. Metode Analisis Data	52
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran	94
D. Implikasi	95
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda skaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وِ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرِّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/

Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Opini Audit Kabupaten Pemalang.....	3
Tabel 2.1	Telaah Pustaka.....	28
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....	40
Tabel 3.2	Instrumen Penelitian.....	43
Tabel 4.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	51
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan.....	51
Tabel 4.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	52
Tabel 4.6	Uji Analisis Deskriptif.....	52
Tabel 4.7	Dasar Intepetasi Skor Item.....	53
Tabel 4.8	Deskripsi Butir Pertanyaan Sistem Pengendalian Internal.....	54
Tabel 4.9	Deskripsi Butir Pernyataan Kompetensi SDM.....	54
Tabel 4.10	Deskripsi Butir Pernyataan Akuntabilitas	55
Tabel 4.11	Deskripsi Butir Pernyataan Transparansi	55
Tabel 4.12	Deskripsi Butir Pernyataan Kualitas LKPD.....	56
Tabel 4.13	Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal	57
Tabel 4.14	Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	57
Tabel 4.15	Uji Validitas Akuntabilitas.....	58
Tabel 4.16	Uji Validitas Transparansi	58
Tabel 4.17	Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
Tabel 4.18	Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4.19	Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)	61
Tabel 4.20	Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.21	Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser	62
Tabel 4.22	Hasil Uji Regresi Berganda.....	63
Tabel 4.23	Hasil Uji F	66
Tabel 4.24	Hasil Uji T	65
Tabel 4.25	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	34
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian.....	I
Lampiran 2	Tabulasi Data Kuisisioner.....	XI
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	XII
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	XV
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	XVII
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	XVIII
Lampiran 7	Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	XIX
Lampiran 8	Hasil Uji Reliabilitas.....	XX
Lampiran 9	Hasil Uji Normalitas (One-Sampel Kolmogorov-Smirnov).....	XXI
Lampiran 10	Hasil Uji Multikolinieritas	XXII
Lampiran 11	Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser	XXIII
Lampiran 12	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	XXIV
Lampiran 13	Hasil Uji F.....	XXV
Lampiran 14	Hasil Uji t (parsial).....	XXVI
Lampiran 15	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	XXVII
Lampiran 16	F tabel.....	XXVIII
Lampiran 17	T tabel	XXIX
Lampiran 18	Surat Pengantar Penelitian	XXX
Lampiran 19	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	XXXI
Lampiran 20	Dokumentasi	XXXII
Lampiran 21	Riwayat Hidup Penulis	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka desentralisasi yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi pelaksana otonomi daerah yang luas dengan mengatur klasifikasi urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut (urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat) yang kemudian didesentralisasi atau penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pembagian tugas antara pusat dan daerah dimaksudkan agar wilayah negara yang luas bisa terawasi setiap plosok daerahnya dengan tujuan memakmurkan masyarakat dan memaksimalkan sumber daya yang ada pada setiap daerah. Undang-undang ini memberikan pemerintah daerah wewenang operasional dan substantif yang lebih besar serta kebutuhan untuk menetapkan tata kelola yang akuntabel di wilayah masing-masing dengan mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab fiskal (Bahasoan et al., 2024). Dalam pemanfaatan sumber daya yang baik suatu daerah, dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah mengatur siklus keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik karena mereka memiliki kewenangan untuk mengawasi anggaran daerah. Supaya masyarakat ataupun pemerintah pusat mengetahui bagaimana kinerja orang-orang yang diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya, diperlukan sebuah laporan sebagai tanda bukti kinerja selama periode tersebut, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemunculan berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah, yang diintegrasikan dalam penggunaan proses keuangan yang akuntabel dan

transparan, menjadi bukti dari hal ini. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa keterbacaan, keterbandingan, relevansi, dan keandalan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan (Imelia et al., 2021). Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan guna memenuhi persyaratan kualitas ini (Giri Laksono, 2023). Jika Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) memberikan pendapat tanpa pengecualian (WTP), laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi (Alviano & Ayudiyati, 2024). LKPD harus sepenuhnya mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar dapat memperoleh opini tersebut, dan pemerintah daerah harus menyajikan data keuangan secara jelas dan komprehensif sesuai dengan persyaratan hukum serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang efisien (Aziyah & Yanto, 2022). Meskipun LKPD yang mendapatkan opini WTP menandakan laporan berkualitas, tidak menutup kemungkinan masih adanya temuan kelemahan dari BPK.

Dari 542 LKPD yang diaudit, 496 di antaranya mendapatkan Pendapat Tanpa Pengecualian (WTP), 41 mendapatkan Pendapat dengan Pengecualian (WDP), dan 5 mendapatkan Penolakan Pendapat (TMP), sesuai dengan Laporan Ringkasan Semester Pertama 2022 BPK (IHSP). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar LKPD masih melanggar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal tersebut juga menunjukkan isu yang masih berlanjut, seperti ketidaktaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta kekurangan dalam sistem pengendalian internal (www.bpk.go.id). Fenomena menarik lainnya adalah ditemukannya kasus korupsi besar oleh pejabat daerah dengan LKPD justru meraih opini WTP, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor (2022)

dan Purbalingga (2018) (kpk.go.id). Kondisi ini mengindikasikan bahwa opini WTP belum sepenuhnya menjamin tidak adanya masalah mendasar dalam tata kelola keuangan.

Menurut tabel di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk di antara pemerintah yang mengalami perubahan dalam persepsi publik antara tahun 2014 s.d 2024:

Tabel 1.1 Opini Audit Kabupaten Pemalang

Tahun	Opini
2014 - 2015	WDP
2016 - 2021	WTP
2022	WDP
2023 - 2024	WTP

Sumber: Jateng.bpk.go.id

Dari tahun 2014 hingga 2024, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pemalang menerima tiga opini dengan pengecualian (WDP) dan tujuh opini tanpa pengecualian (WTP). Kabupaten Pemalang menerima Opini dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan 2015, kemudian Kabupaten Pemalang berhasil mempertahankan opini WTP selama enam tahun. Namun, pada tahun 2022 Kabupaten Pemalang kembali mendapatkan Opini WDP, dimana dari opini tersebut menandakan penurunan dan inkonsistensi pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan keuangan. Menurut (Putro & Mollet, 2020) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikeluarkan ketika terdapat penyajian yang tidak benar secara material yang mempengaruhi beberapa item dalam laporan keuangan, dan ketika rekomendasi auditor terkait item yang dikecualikan belum ditangani dengan memadai. LKPD Kabupaten Pemalang yang mendapatkan WDP pada tahun 2022 terdapat

catatan dari BPK yaitu meliputi ketidakakuratan dalam pengelolaan aset tetap, penatausahaan kas, dan ketidakpatuhan belanja (Pemalangkab.go.id). Situasi ini mengganggu keandalan laporan keuangan akibat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), sehingga meningkatkan risiko bahwa pemangku kepentingan dapat menerima informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. (Putri & Rahmah, 2023). SPI juga dapat mempengaruhi dalam proses penyusunan laporan keuangan, seperti halnya lingkungan pekerjaan dan bagaimana pengendalian sistem pemerintahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tanpa bantuan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dengan baik, yang memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan analitis yang kuat dalam pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya terwujud (Putri & Rahmah, 2023).

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal seringkali timbul akibat catatan akuntansi yang tidak akurat, penerapan prosedur yang telah ditetapkan secara tidak tepat, kebijakan akuntansi yang tidak jelas, pengawasan yang tidak memadai, dan mekanisme pengendalian yang lemah (Rumbayan et al., 2024). Masalah-masalah ini seringkali disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia, terutama di bagian akuntansi, yang mengakibatkan pengelolaan keuangan yang buruk oleh pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Putri & Rahmah, 2023).

Menurut (Zubaidah & Nugraeni, 2023) LKPD yang mendapatkan opini WDP dapat disebabkan karena akuntabilitas yang lemah. Menurut pedoman tahun 2003 tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah, pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban lembaga pemerintah untuk menjelaskan dan membenarkan

kinerjanya kepada pihak berwenang yang berkompeten, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/YI99. Selain itu, hal ini bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan (Nurfani Salasa et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang bersifat transparan serta akuntabel menjadi sebuah kewajiban yuridis. Regulasi tersebut mengamanatkan agar LKPD disusun sedemikian rupa guna menjamin kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Penekanan tersebut muncul karena hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pemerintah daerah selaku yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya harus dipenuhi (Aziyah & Yanto, 2022).

Pada tahun 2023 dan 2024 opini BPK membaik dari WDP menjadi WTP. Menariknya, meskipun Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap mengidentifikasi adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang mana BPK menemukan temuan bahwa terdapat ketidaksesuaian berupa kelebihan pembayaran belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 88.015.461,46 dan kelebihan bayar dengan nominal Rp 898.706.931,65 (Jateng.bpk.go.id). Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kelemahan dalam mengatur keuangan

daerahnya. Padahal nominal tersebut tidak tergolong sedikit, jika saja dimanfaatkan dengan baik dan benar, dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dana yang dikeluarkan juga merupakan hasil dari pajak masyarakat, yang mana diharapkan pemerintah daerah selaku pengelola keuangan dan sumber daya daerah mampu memberikan *feedback* yang baik dengan melakukan kebijakan yang kemudian akan kembali kepada masyarakat. Parahnya, pemborosan, kelebihan bayar, dan ketidakpatuhan ini sering dilakukan sehingga menjadi catatan berulang oleh BPK. Namun, temuan tersebut dikategorikan berada di bawah ambang batas materialitas. Fenomena ini memicu pertanyaan mengenai apakah peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP merepresentasikan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara substantif, atau hanya nilai kesalahan yang tidak material. Oleh karena itu, penelitian ini tidak semata-mata melihat opini BPK, tetapi ingin menguji secara empiris bagaimana persepsi pihak yang melakukan pengawasan internal (Inspektorat) terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, kompetensi SDM, akuntabilitas, dan transparansi dalam menghasilkan LKPD yang benar-benar berkualitas.

Banyak peneliti telah mengkaji cara-cara di mana sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, dan transparansi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat hubungan yang baik antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (BPKAD) (Firmansyah & Sinambela, 2021). Namun, (Riana Mayasari, 2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang kecil terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, (Rahmiati & Baihaqi, 2025) mengamati adanya hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan, sementara (Imelia et al., 2021) menemukan korelasi negatif yang tidak signifikan. Menurut temuan studi, akuntabilitas meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Alviano & Ayudiyati, 2024). Namun, penelitian oleh (Zubaidah & Nugraeni, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas tidak memiliki dampak yang bermanfaat atau signifikan. Menurut (Zubaidah & Nugraeni, 2023), transparansi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun, menurut (Ferlia et al., 2023) transparansi tidak memiliki dampak yang jelas dan bermanfaat terhadap kualitas pelaporan keuangan lokal.

Mengingat adanya fenomena ini dan adanya kesenjangan penelitian, peneliti akan melakukan penyelidikan terhadap “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang”. Variabel bebas yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, dan Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang?

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Pemalang?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang?
4. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang?
5. Apakah sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, serta transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang diterapkan
2. Untuk menyelidiki bagaimana sistem kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang.
3. Untuk menyelidiki dampak sistem akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang.
4. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh mekanisme transparansi yang diterapkan
5. Untuk menganalisis bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, dan transparansi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat diberikannya manfaat dari penelitian ini:

1. Kontribusi Teoretis Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data aktual mengenai dampak pengendalian internal, akuntabilitas, dan keterbukaan mengenai kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Selain itu, diharapkan temuan studi ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik terkait, yang akan membantu memperluas pengetahuan di bidang ini.
2. Diharapkan temuan studi ini akan memberikan analisis mendalam dan saran yang bermanfaat untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan prosedur pelaporan keuangannya. Memberikan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam mengevaluasi efektivitas SPI dan kompetensi SDM di lingkungan OPD. Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya disarankan untuk menggunakan temuan ini sebagai panduan yang bermanfaat saat menerapkan inisiatif yang akan meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas umum pelaporan keuangan.

E. Sistematika Pembahasan

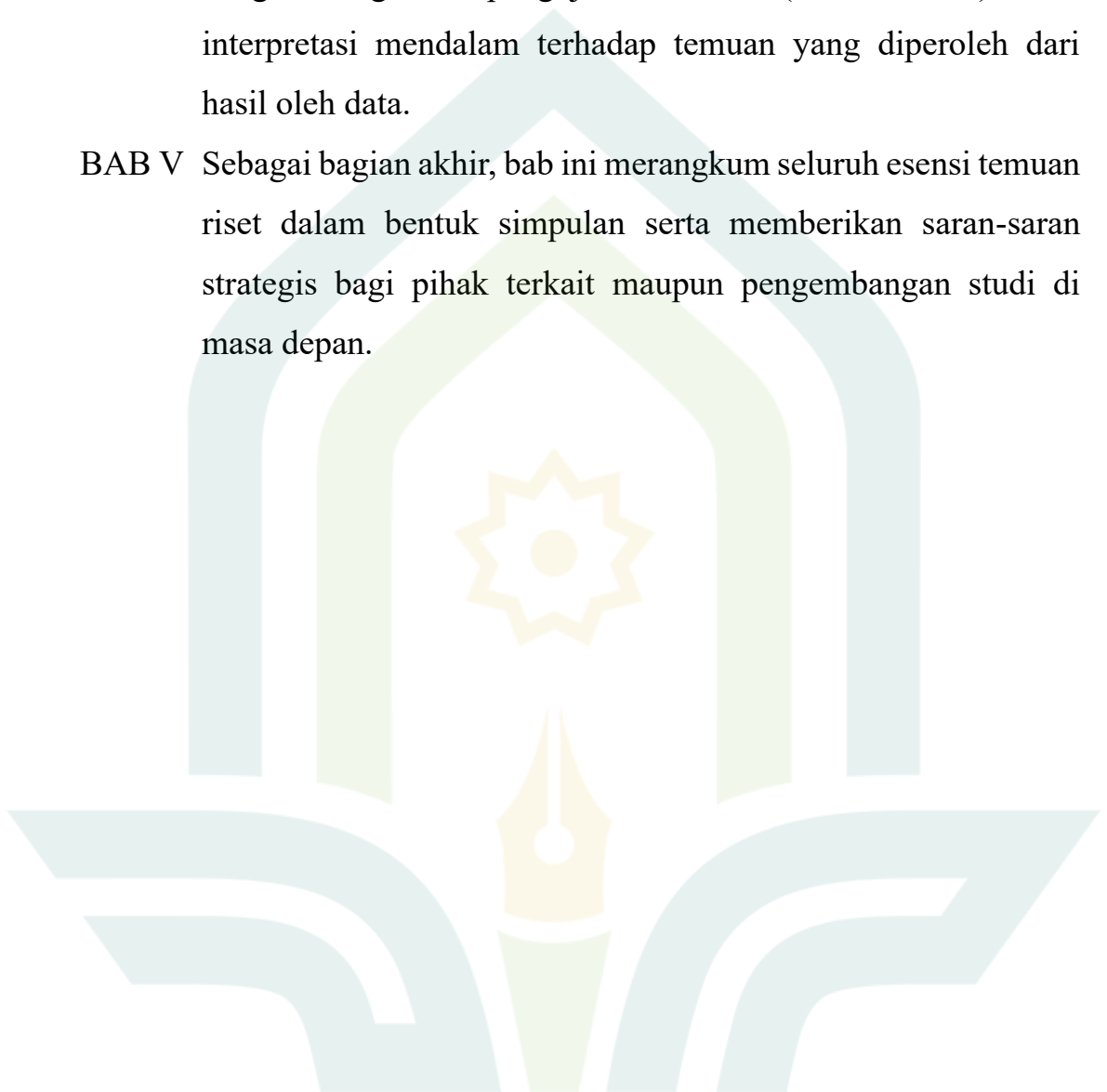
BAB I Bagaian awal ini menguraikan urgensi pemilihan topik melalui latar belakang, perumusan fokus masalah, sasaran serta kegunaan riset, hingga menjelaskan terminologi dan alur penulisan secara komprehensif.

BAB II Dalam bab ini, dipaparkan landasan teoritis yang menjadi basis penelitian serta telaah terhadap berbagai studi terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan tema yang diangkat.

BAB III Fokus utama bab ini adalah menjabarkan desain riset, prosedur pengumpulan data, serta pendekatan metodologis yang digunakan untuk membedah fenomena penelitian.

BAB IV Bagian ini menyajikan prototipe data secara deskriptif, diikuti dengan rangkaian pengujian statistik (analisis data) serta interpretasi mendalam terhadap temuan yang diperoleh dari hasil olah data.

BAB V Sebagai bagian akhir, bab ini merangkum seluruh esensi temuan riset dalam bentuk simpulan serta memberikan saran-saran strategis bagi pihak terkait maupun pengembangan studi di masa depan.



16,178 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,74 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima. Artinya, keempat variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Pemalang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Responden penelitian terbatas pada APIP dan PPUPD di Inspektorat Kabupaten Pemalang sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan persepsi aparat pengawas internal.
3. Variasi variabel yang masih terbatas karena hanya mencakup empat variabel independen saja. Masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dengan memperkuat Teori Agensi dalam menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi merupakan faktor yang mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan bersifat kontekstual, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan tersebut.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya Inspektorat sebagai APIP, bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan perlu difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penerapan akuntabilitas perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada

pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

D. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya diharapkan dapat terus memperkuat penerapan sistem pengendalian internal dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah karena kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas perlu dilakukan agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara substantif.
2. APIC diharapkan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu memperkuat penerapan sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta mendorong akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa pemerintah daerah agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian juga dapat melibatkan responden dari organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penyusun laporan keuangan sehingga diperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2025). Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2, 104–112.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Alviano, I., & Ayudiyati, C. (2024). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2636–2644.
- Arisman, A., Putriyani, A., & Afandi, A. (2018). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Perspektif Islam. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 293–304. <https://doi.org/10.15408/Akt.V11i2.8860>
- Arlia Meilani, L. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia Islam Pada Bank Syariah. *Khazanah Sosial*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.15575/Ks.V1i1>.
- Asiam, S. (2020). Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2), 128–136. [https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3\(2\).5719](https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3(2).5719)
- Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213–224. <https://doi.org/10.33369/Fairness.V8i3.15210>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan

Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 7–10.

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.V8i1.1119>

Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (T. S. Tambunan (Ed.)). Cv. Media Sains Indonesia.

Dewi, I. A. G. W., & Herlambang, P. G. D. (2024). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Uptd Puskesmas *Journal Human Resources* 24/7 ..., 1(2), 1–23. <http://jhr247.org/index.php/jhr247bisma/article/download/123/95>

Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bkad Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.V1i2.9>

Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.47491/landjournal.V1i1.557>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss* 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Giri Laksono, R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi,

Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Kabupaten Jember. *Journal Of Economics And Business Ubs*, 12(5), 3155–3170. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.586>

Haikal, M. F. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April), 89–112.

Hartadi, M. P., Astarini, D. A. O., & Septian, D. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Kabupaten Lombok Timur). *Zentrum Economic, Business, Management And Accounting Research*, 1(1).

Hermawan. (2023). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar Dalam Bingkai Yadnya. *International Journal Of Technology*, 47(1), 100950. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002>
<https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950>
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007>
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816>
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>

Ilhami, A. R., Hasana, A. Z., & Musfiroh, L. (2026). Reinterpretasi Varians Anggaran : Sensemaking Auditee Dan Paradoks Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dpupr Jember. *Journal Of Citizenship*, 5(2), 402–414.

Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *Справочник Снс 2020*, 6(3), 119–123. <https://doi.org/10.18356/9789210051927c006>

Ivandar, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap

- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal , Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2339–0832), 231–246.
- Karinta, H. S., & Rusdi, D. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batang*. September, 110–129. [Http://Eprints.Uty.Ac.Id/9782/](http://Eprints.Uty.Ac.Id/9782/)
- Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Lppm Bidang ...*, 5(2), 1173–1182. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lppmekosobudkum/Article/View/40270%0ahttps://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lppmekosobudkum/Article/Download/40270/36516>
- Launuru, M. I. (2018). Perspektif Islam Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Harian Rakyat Maluku. *Journal Of Islamic Economic And Business (Jeb)*, Vol.2(No.1), Hal.683-684.
- Lestari, N. A. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.32897/Jiim.2023.2.1.2768>
- Lubis, A. S., & Munawaroh. (2020). Telaah Konsep Kompetensi Sumber Daya Manusia Islami Dalam Menghadapi Perkembangan Revolusi Industri. *Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019*, 86, 120–126.
- Nurfani Salasa, Muhsin N. Bailusy, & Suratno Amiro. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 540–575.

<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.V1i2.2553>

Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 72–80. <https://doi.org/10.31506/Jap.V1i1.5220>

Pathulrahman, D. M., Pipit, Irvani, A. D., Aslamiyah, T., & Joni. (2025). Perbedaan Filosofis Dan Praktis Dalam Laporan Keuangan: Perspektif Konvensional Vs Syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.

Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. *E-Jra*, 11(09), 84–92.

Putri, D., & Rahmah, N. A. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Lkpd Bandung Barat. *Journal Of Business & Banking*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.14414/Jbb.V13i1.3738>

Putro, S. H., & Mollet, J. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Lima Wilayah Adat Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, VII(3), 1–13.

Rahmiati, K., & Baihaqi. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 3081–3101.

Ramadhani, S. A., & Rufaedah, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Skpd Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 261–269.

Riana Mayasari. (2022). Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal Untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 113–122. <https://doi.org/10.33795/Jraam.V6i1.011>

Rumbayan, P. L. I. M., Tinangon, J. J., & Sardjono, O. Y. . (2024). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kotamobagu. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 52–66. <https://doi.org/10.58784/Mbkk.108>

Saputra, M. A., & Novita. (2023). Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Coso Framwork Pada Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 197–210. <http://jra.politala.ac.id/index.php/jra/index>

Sari, P. A., & Hidayat, I. (2022). Analisis Laporan Keuangan. In *Eureka Media Aksara* (Vol. 1, Issue 69).

Sarwono, Eddy, A., & Handayani, A. (2021). *Metode Kuantitatif*. Unisri Press.

Taufiqurrohman, T., Mudawanah, S., & Muthanudin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis (The Indonesian Journal Of Management & Accounting)*, 9(2), 103–112. <https://doi.org/10.55171/Jsab.V9i2.579>

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.

Wahyuni, S., & Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *Balance : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 41–54.

<https://doi.org/10.35905/Balanca.V3i01.1986>

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17.

<https://doi.org/10.22146/Jkap.7523>

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i3.3475>

